



**USAID**  
DARI RAKYAT AMERIKA



# BUKU SAKU POKMASWAS

Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat  
dan Peran Kelompok Masyarakat Pengawas  
dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
yang Berkelanjutan





**USAID**  
DARI RAKYAT AMERIKA

# Lestari Lautku Banyak Ikanku



PROYEK USAID SUSTAINABLE ECOSYSTEMS  
ADVANCED (USAID SEA)

# Daftar Isi

<b>1. Pengertian Siswasmas</b>	<b>01</b>
1.1 Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (Siswasmas)	01
1.2 Masyarakat Dalam Siswasmas	02
<b>2. Pengertian Pokmaswas</b>	<b>03</b>
2.1 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	03
2.2 Prinsip Pembentukan Pokmaswas	03
2.3 Cara Pembentukan Pokmaswas	03
2.4 Keanggotaan Pokmaswas	04
2.5 Kepengurusan Pokmaswas	04
2.6 Penguatan Untuk Kelompok Pengawas Berbasis Sistem Adat	05
<b>3. Peran Pokmaswas Dalam Melindungi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>06</b>
3.1 Peran Pokmaswas	06
3.2 Larangan Bagi Pokmaswas dan Masyarakat	07
3.3 Pokmaswas Dalam Siswasmas	08
3.4 Sumbangsih Pokmaswas Terhadap Desa	08
3.5 Perlindungan Hukum untuk Pokmaswas	09
3.6 Penguatan Jaringan Pokmaswas	10
<b>4. Alur Pelaporan oleh Pokmaswas dan Masyarakat</b>	<b>12</b>
4.1 Kepada Siapa Melaporkan	12
4.2 Apa yang Dilaporkan	13
4.3 Contoh Laporan Melalui SMS Gateway	14
4.4 Tips Mengirim Laporan Melalui SMS Gateway	15
<b>5. Tindak Kejahatan dan Pelanggaran di Kawasan Konservasi Perairan</b>	<b>16</b>
5.1 Tindak Kejahatan dan Pelanggaran Perikanan	16
5.2 Tindak Kejahatan dan Pelanggaran terkait Spesies Hewan Laut	17
5.3 Tindak Pelanggaran Terhadap Habitat Pesisir dan Laut	18
5.4 Pelanggaran Terkait Zonasi dan Navigasi	18
5.5 Pelanggaran/Kejahatan Lainnya	19
<b>6. Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan</b>	<b>20</b>
6.1 Alur Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan	20
6.2 Prasyarat Suksesnya Penyelesaian Perkara di Pengadilan	22
<b>7. Nomor Telpon Penting</b>	<b>23</b>
<b>8. Lampiran</b>	<b>24</b>

# Pengertian Siswasmas



Photo: Coral Triangle Center/Erni

Nelayan mengikuti upacara adat Buka Sasi di Negeri Noloth, Saparua sebagai salah satu upaya melestarikan sumber daya laut.

## 1.1 Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (Siswasmas)

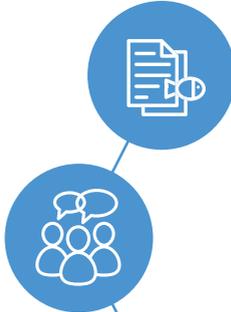
Siswasmas adalah sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang melibatkan peran aktif masyarakat (yang mengakui tradisi atau budaya setempat yang ramah lingkungan) untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan (KepmenKP No.58/2001).

Masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok dapat ikut serta dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (UU No.31/2004 pasal 67). Siswasmas digunakan sebagai ukuran bagi para pihak untuk memastikan pemanfaatan sumber daya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

## I.2 Masyarakat Dalam Siswasmas

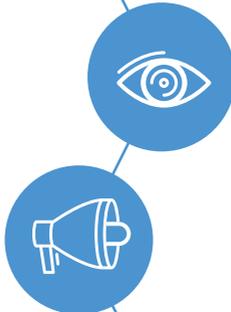
Peran serta masyarakat dilindungi oleh pemerintah melalui KepmenKP No.58 Tahun 2001 tentang Siswasmas dan PermenKP No.40 Tahun 2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Masyarakat dapat berperan dalam Siswasmas dengan cara :

Membantu sosialisasi aturan untuk membuat masyarakat luas patuh terhadap aturan.



Mematuhi aturan perundang-undangan dalam pengelolaan sumber daya ikan.

Melaporkan tindakan atau hal-hal yang akan membahayakan atau menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan kelestarian sumber daya.



Melaporkan tindakan dugaan pencemaran dan atau perusakan sumber daya kelautan dan perikanan

Bersedia memberikan keterangan atau bersaksi dalam perkara penegakan hukum tindak pidana perikanan.



mendukung Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) dan penegak hukum dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

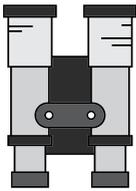
Tidak main hakim sendiri



# 2 Pengertian Pokmaswas

## 2.1 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)

Pokmaswas merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang membantu pemerintah dalam upaya penyadaran hukum melalui sosialisasi dan pelaksanaan prinsip 3 M (Melihat/Mendengar, Mencatat, dan Melaporkan).



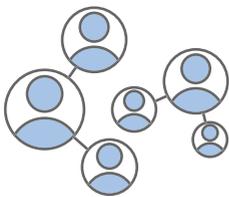
Melihat/Mendengar



Mencatat



Melaporkan



## 2.2 Prinsip Pembentukan Pokmaswas

Pokmaswas dibentuk dari dan untuk masyarakat dengan prinsip kesukarelaan dibantu oleh pemerintah yang berperan sebagai fasilitator.



## 2.3 Cara Pembentukan Pokmaswas

Kepala Desa mengajukan surat peminatan pembentukan Pokmaswas kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, dengan melampirkan fotokopi KTP calon anggota Pokmaswas dan struktur pengurus pokmaswas.

## 2.4 Keanggotaan Pokmaswas

Anggota Pokmaswas merupakan bagian dari masyarakat sekaligus pelaksana pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang membantu tugas pemerintah di daerah/desanya masing-masing. Anggota Pokmaswas boleh berasal dari tokoh masyarakat, tokoh adat, perwakilan perempuan dan pemuda, nelayan, petani ikan, serta masyarakat maritim lainnya termasuk nelayan yang menjadi Anak Buah Kapal (ABK) kapal-kapal penangkap ikan.

## 2.5 Kepengurusan Pokmaswas

Pengurus Pokmaswas dipilih oleh para anggota, dengan susunan kepengurusan minimal terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara.

Pengurus Pokmaswas wajib untuk selalu memberikan laporan dan berkoordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten dan DKP Provinsi. Masa kepengurusan dicantumkan dalam Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Pokmaswas yang berlaku selama periode 5 (lima) tahun. Apabila kelompok memiliki kesulitan dalam menyusun AD/ART, maka kepala desa dapat meminta bantuan kepada DKP Provinsi.



## 2.6 Penguohan Untuk Kelompok Pengawas Berbasis Sistem Adat

Apabila sudah ada kelompok pengawas adat yang sudah aktif, maka tidak perlu dibentuk yang baru. Kepala desa atau negeri adat dapat menyampaikan surat permohonan penguohan kelompok pengawas adat kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk mendapatkan pembinaan dan perlindungan sebagai kelompok pengawas. Surat tersebut dilengkapi dengan:

- Surat dari Kepala Desa administratif atau Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota tersebut yang menyatakan bahwa kelompok pengawas berbasis adat tersebut memang telah ada dan menjalankan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- KTP ketua kelompok dan anggota-anggota.
- Informasi tentang struktur dan pertanggung-jawaban dan pelaporan kelompok ini dalam sistem atau aturan adat.
- Fotocopy aturan adat yang ditegakkan di wilayah negeri tersebut.

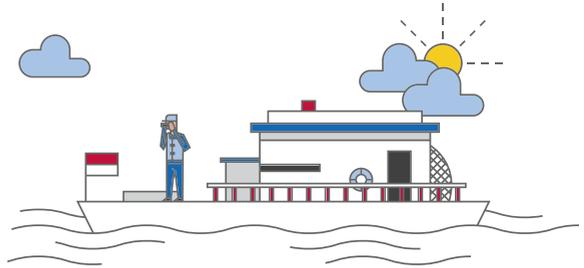


*Anggota Pokmaswas Pasir Putih Desa Fatkayon Kabupaten Kepulauan Sula melepaskan anakan penyu ke pantai sebagai upaya perlindungan terhadap species penyu yang terancam punah.*

# 3 Peran Pokmaswas dalam Melindungi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

## 3.1 Peran Pokmaswas

Sebagai pelaksana di tingkat lapangan yang membantu pemerintah dalam pengawasan kawasan perairan, Pokmaswas memiliki peran untuk :



1. Membantu pemerintah dalam pengawasan Kawasan Konservasi Perairan.
2. Melaporkan tindakan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
3. Membantu pemerintah dalam sosialisasi aturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
4. Melaporkan tindakan perusakan lingkungan di wilayah pesisir.
5. Mengisi logbook atau buku harian Pokmaswas yang berisi informasi mengenai kegiatan monitoring atau pengawasan, penyuluhan, dan sosialisasi yang dilakukan oleh Pokmaswas.

### 3.2 Larangan Bagi Pokmaswas dan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugasnya, Pokmaswas dan masyarakat dilarang melakukan tindakan-tindakan di bawah ini

- Menghakimi tersangka pelaku pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan.  
\_\_\_\_\_
- Bertindak sebagai aparat penegak hukum.  
\_\_\_\_\_
- Menghakimi tersangka pelaku pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan.  
\_\_\_\_\_
- Menerapkan aturan yang tidak ada dasar hukumnya.  
\_\_\_\_\_
- Melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.  
\_\_\_\_\_
- Memanfaatkan peran sebagai Pokmaswas untuk keuntungan dan/atau kepentingan pribadi maupun kelompok.  
\_\_\_\_\_
- Membiarkan terjadinya suatu pelanggaran dan/atau tindak pidana kelautan dan perikanan tanpa adanya upaya untuk melaporkannya.  
\_\_\_\_\_



### 3.3 Pokmaswas Dalam Siswasmas

**Pokmaswas aktif dan berfungsi**

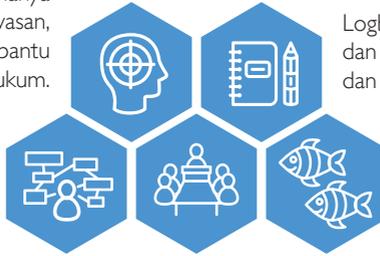
Bukan hanya monitoring/pengawasan, tetapi juga membantu penyesuaian hukum.

**Logbook Pokmaswas diisi dan digunakan**

Logbook Pokmaswas diisi penuh dan digunakan oleh Pokmaswas dan diakui oleh Pimpinan Desa

**Integrasi Data Pokmaswas**

Data Pokmaswas hasil monitoring/pengawasan dilaporkan dan dipadukan ke dalam data desa



**Pokmaswas dilindungi**

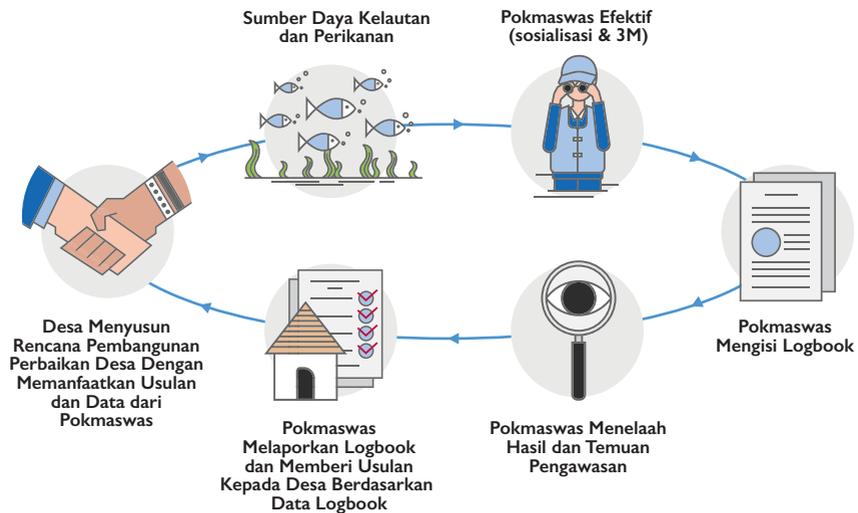
Perlindungan Pokmaswas dijamin oleh Desa

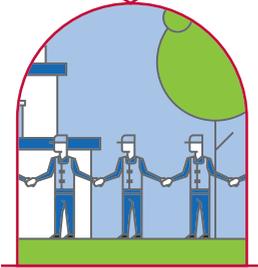
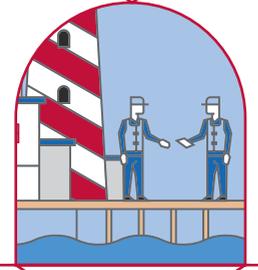
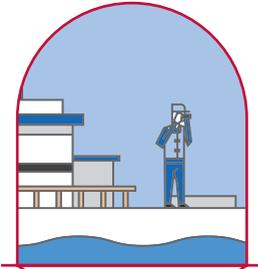
**Pokmaswas memberikan masukan pada Program Desa dan lainnya**

Data Pokmaswas menjadi input pengelolaan sumber daya perikanan/KKP di tingkat lokal

### 3.4 Sumbangsih Pokmaswas Terhadap Desa

Masyarakat dapat merasakan keuntungan dari keberadaan dan berfungsinya Pokmaswas, karena kelompok ini dapat turut serta membantu menjaga kelangsungan sumber daya kelautan dan perikanan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.





### 3.5 Perlindungan Hukum untuk Pokmaswas

Perlindungan kepada masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok yang ikut serta dalam kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dijamin melalui :

- UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pasal 67
- UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- PermenKP No. 40 Tahun 2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pasal 9.

Untuk memastikan Pokmaswas dapat terlindungi secara hukum dalam menjalankan perannya, maka pastikan:

- Anggota Pokmaswas tercantum dalam SK dan memiliki Kartu Anggota dari DKP Provinsi. Dengan Kartu Anggota Pokmaswas, upaya perlindungan lebih mudah untuk diberikan.
  - Saat melaksanakan monitoring/ pengawasan, disarankan untuk membawa surat dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa anggota Pokmaswas sedang melaksanakan kegiatan monitoring. Hal ini penting untuk memastikan Kepala Desa mengetahui kegiatan ini, sehingga jika terjadi hal yang mengganggu keselamatan anggota Pokmaswas, maka Kepala Desa dan para pihak dapat mengerahkan atau meminta bantuan.
- Apabila dalam proses pelaporan suatu kasus atau proses penegakan hukum yang sedang berjalan, Pokmaswas mendapatkan intimidasi dari pihak-pihak tertentu, maka anggota Pokmaswas dapat melaporkan diri pada salah satu atau beberapa dari pihak-pihak bawenang, seperti Kepala Desa, aparat penegak hukum terdekat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Dinas Perikanan Kabupaten/Kota, DKP Provinsi, Kantor UPT PSDKP, SMS gateway dan/atau Kantor LBH (Lembaga Bantuan Hukum).

Perlindungan diberikan dalam posisi Pokmaswas memang terbukti mendapatkan serangan karena upaya perlindungan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun perlindungan tidak akan diberikan apabila Pokmaswas melakukan atau terlibat dalam pelanggaran.

### 3.6 Penguatan Jaringan Pokmaswas

- Pokmaswas menjalin dan memperkuat kemitraan dengan Dinas Perikanan Kabupaten, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi, dan aparat penegak hukum.

---

- Memiliki daftar nama, nomor telepon dan alamat dari petugas penegak hukum terdekat dan daftar tersebut terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan.

---

- Pokmaswas dapat menjadi mitra penegak hukum sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

---




Photo: Coral Triangle Center/Kasman

- Pokmaswas juga dapat bermitra dengan LSM, universitas, atau pihak lain dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk membantu penyadaran hukum.
- Pokmaswas dapat bekerjasama dengan pokmaswas desa atau daerah lain dan juga kelompok pengawas berbasis adat untuk memperkuat efektivitas pengawasan, dan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengawasan”

*Anggota Pokmaswas mengikuti pelatihan RUM di Kepulauan Sula*



# 4 Alur Pelaporan oleh Pokmaswas



## 4.1 Kepada Siapa Melaporkan

Ketika Pokmaswas atau masyarakat mendapatkan informasi adanya dugaan pelanggaran dan dugaan tindak pidana perikanan, kepada siapa harus melapor?

### Petugas Penegak Hukum

- Penyidik Perikanan, atau
- Pengawas Perikanan atau Polsus, atau
- Babinkamtibmas atau Babinsa terdekat, atau
- Satpol-AIRUD atau Polisi terdekat (Polsek, Polres, Polda)
- TNI AL terdekat



### Petugas Non Penegak Hukum

- Aparat Desa/ Kelurahan/ Distrik/Kecamatan/Negri, atau
- Kepala Pelabuhan Perikanan, atau  
Petugas Karantina di Pelabuhan



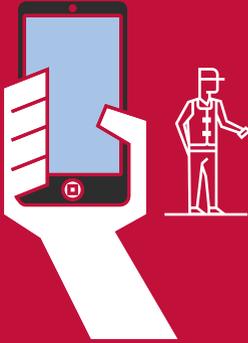
### SMS Gateway ke nomor 085 88888 4171 dengan 1 (angka satu) pesan anda

Informasi minimum yang perlu dilaporkan

- Jenis pelanggaran
- Lokasi
- Waktu kejadian
- Identitas kapal atau pelanggar (jika ada)
- Identitas pelapor



## 4.2 Apa yang Dilaporkan

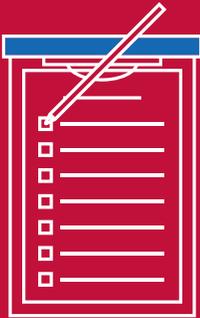


### SMS ke nomor 085 888884171

Bentuk format SMS dilakukan sebagai berikut:

1. Pesan ditulis dengan format I\* PESAN ANDA
2. Contoh pengiriman info/laporan kejadian pelanggaran sebagai berikut:

I\*sebuah perahu melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang di perairan Bengkulu | 4/9/1 | 14:30

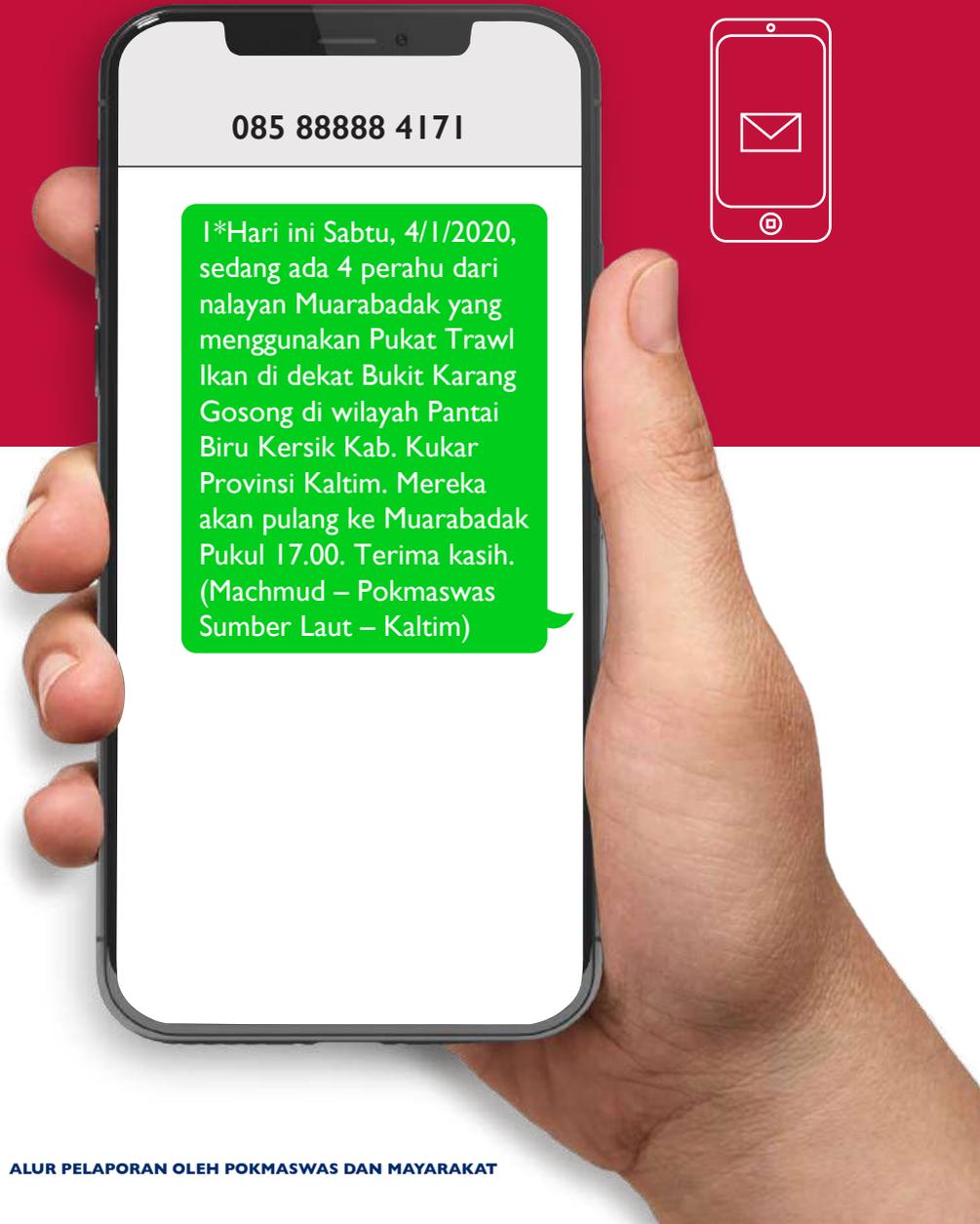


1. Bentuk pelanggaran perikanan.
2. Lokasi pelanggaran.
3. Waktu kejadian.
4. Pernyataan saksi pelanggaran perikanan lengkap dengan mencatat nomor telepon dan identitas saksi.
5. Kronologi kejadian pelanggaran perikanan.
6. Jenis kapal (kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dan/atau kapal penelitian).
7. Tanda pengenal kapal (nomor kapal, bendera, nomor lambung, warna kapal).
8. Kegiatan kapal (menarik jaring, membongkar dan memindahkan ikan, membuang limbah, dan/atau menggunakan cara-cara penangkapan yang merusak ekosistem).
9. Data dan informasi lainnya, misalkan arah kapal.



Selain pelaporan secara tulisan, anggota masyarakat juga dapat menggunakan telepon, radio komunikasi, dan SMS

### 4.3 Contoh Laporan Melalui SMS Gateway



#### 4.4 Tips Mengirim Laporan Melalui SMS Gateway

3 (tiga) kunci yang membuat SMS ini segera ditindaklanjuti oleh DKP Provinsi Kaltim dan KKP adalah:

- 01** Pesan ada kata kunci “trawl” yang memang dilarang atau membuktikan pelanggaran



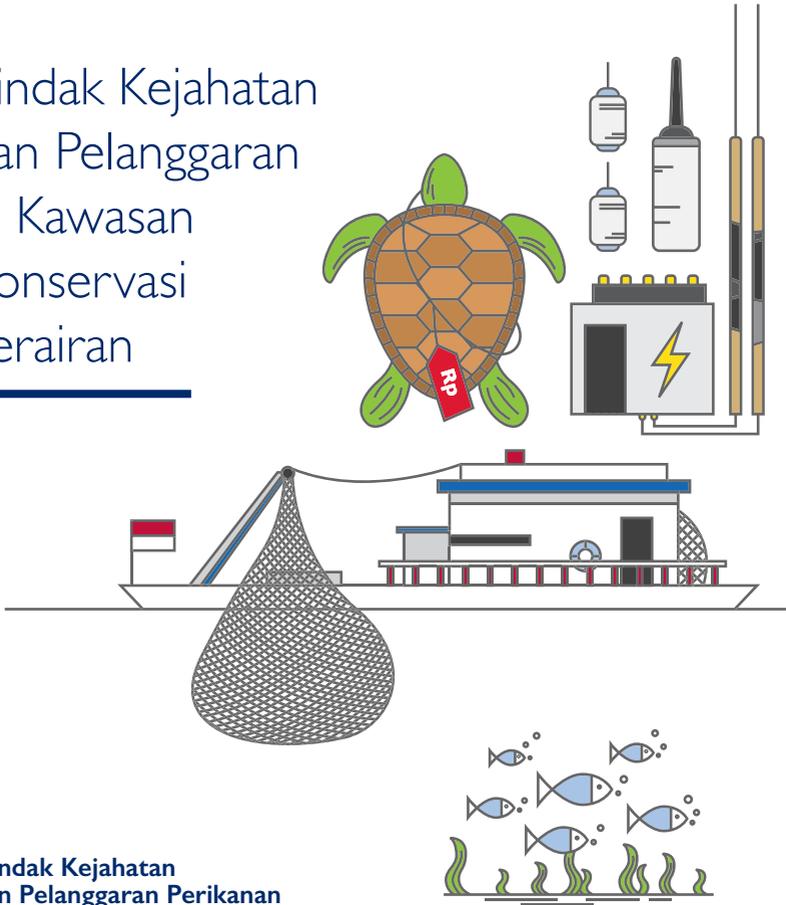
- 02** Informasi posisi cukup jelas



- 03** Data pengirim jelas

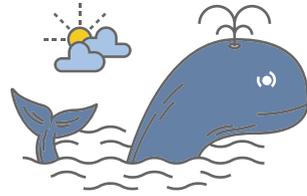


# 5 Tindak Kejahatan dan Pelanggaran di Kawasan Konservasi Perairan



## 5.1 Tindak Kejahatan dan Pelanggaran Perikanan

- A** Kapal ikan yang melakukan tindakan penangkapan yang illegal dan mengancam keamanan masyarakat dan/atau sumber daya kelautan dan perikanan di tempat tersebut.
- B** Kegiatan pemasaran atau tempat dipasarkannya ikan hasil yang ditangkap dari hasil pemboman, atau penggunaan bius dan racun, yang dapat membahayakan manusia, lingkungan serta sumber daya kelautan dan perikanan.
- C** Kegiatan penangkapan ikan yang merusak (pemboman, atau penggunaan bius dan racun) dan/atau yang menggunakan alat tangkap yang dilarang.
- D** Kegiatan budidaya ikan dengan menggunakan obat berbahaya, atau yang menggunakan cara-cara yang berbahaya bagi lingkungan dan manusia.



## 5.2 Tindak Kejahatan dan Pelanggaran terkait Spesies Hewan Laut

Memelihara, menangkap dan memperjualbelikan spesies hewan laut yang dilindungi, langka dan terancam punah

### Jenis-jenis spesies yang dilindungi

01 Penyu

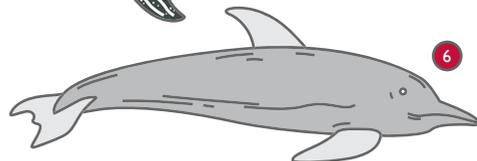
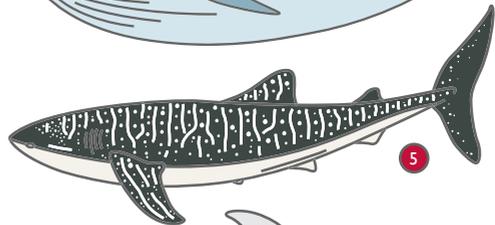
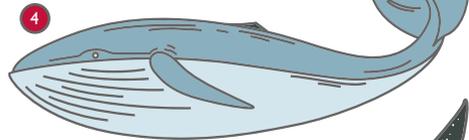
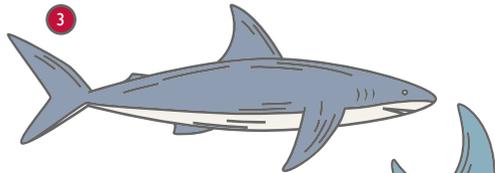
02 Dugong

03 Hiu

04 Paus Biru

05 Hiu Paus

06 Lumba - Lumba



### 5.3 Tindak Pelanggaran terhadap Habitat Pesisir dan Laut



- A** Perusakan habitat muara sungai.

---

- B** Perusakan habitat pesisir seperti pantai dan gundukan pasir.

---

- C** Perusakan habitat laut termasuk padang lamun, mangrove dan terumbu karang.

---

- D** Pencemaran laut dengan membuang sampah kegiatan perikanan ke laut.

---

- E** Pemanfaatan atau operasi yang tidak sah di tepi pantai dan garis pantai.

---




### 5.4 Pelanggaran terkait Zonasi Dan Navigasi

- A** Tidak taat pada peraturan 'jalur' bahari.

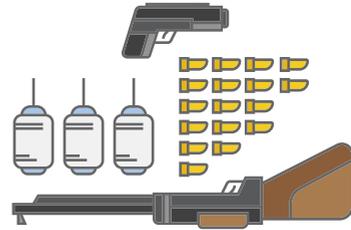
---

- B** Berlayar melalui dan bersauh di kawasan non-navigasi.

---

- C** Penggunaan jalur laut, dermaga dan pelabuhan yang tidak tepat.

---



### 5.5 Pelanggaran/Kejahatan Lainnya

- A** Pengangkutan dan penjualan ammonium nitrat dan bahan baku lain untuk pembuatan bahan peledak secara ilegal.
- B** Pengangkutan dan penjualan peralatan bahan peledak (misalnya sumbu) secara ilegal.
- C** Kepemilikan dan pengangkutan senjata api secara ilegal.

Anggota Pokmaswas mengikuti pelatihan RUM di Kepulauan Sula.



Photo: Coral Triangle Center/Agustin

# 6 Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan

## 6.1 Alur Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan

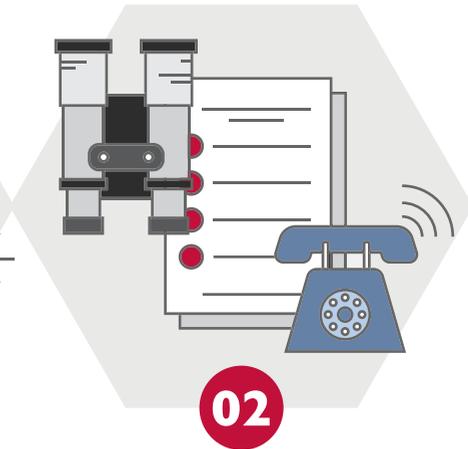
### Proses Penyadartahuan



01

- Menyampaikan informasi aturan,
- Mengembangkan keinginan dan kesediaan untuk mematuhi aturan

### Pengawasan dan Pelaporan



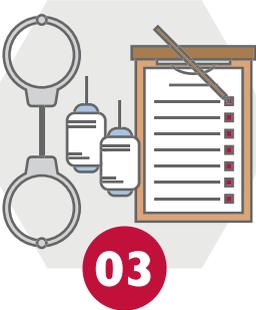
02

- Mengamati,
- Membuktikan secara awal
- Melaporkan

# 30 hari

Proses penyelesaian perkara  
di setiap tahapannya  
(Maksimal 30 Hari)

## Penyidikan



03

- Pengecekan barang bukti
- Menentukan awal tindakan pidana
- Menemukan dugaan tersangka
- Upaya paksa
- Pemeriksaan berkas

## Penuntutan Perkara



04

- Pelimpahan perkara pidana ke pengadilan
- Pemeriksaan
- Penuntutan sanksi

## Peradilan



05

- Pemeriksaan
- Pengadilan
- Pemutusan perkara

## 6.2 Prasyarat Suksesnya Penyelesaian Perkara di Pengadilan

### Penyidikan yang Sukses

Laporan yang ditunjang dengan bukti permulaan yang cukup (dokumen, alat atau sarana yang digunakan, dan bukti) dan memenuhi unsur tindak pidana perikanan atau pelanggaran.

### Penuntutan yang Sukses

Penuntutan yang jelas dan lengkap (tanggal penuntutan, identitas yang benar dan jelas dari tergugat, bukti, waktu dan tempat kejadian perkara pasal yang dilanggar, dan sanksi yang diajukan).



### Pemutusan Perkara yang Sukses

Pendapat hakim (dipertajam dengan pengalaman dan pengetahuan) dan kesesuaian yang meyakinkan pada setidaknya 2 alat bukti yang sah bahwa perkara pidana benar-benar terjadi dan tergugatlah yang melakukannya.

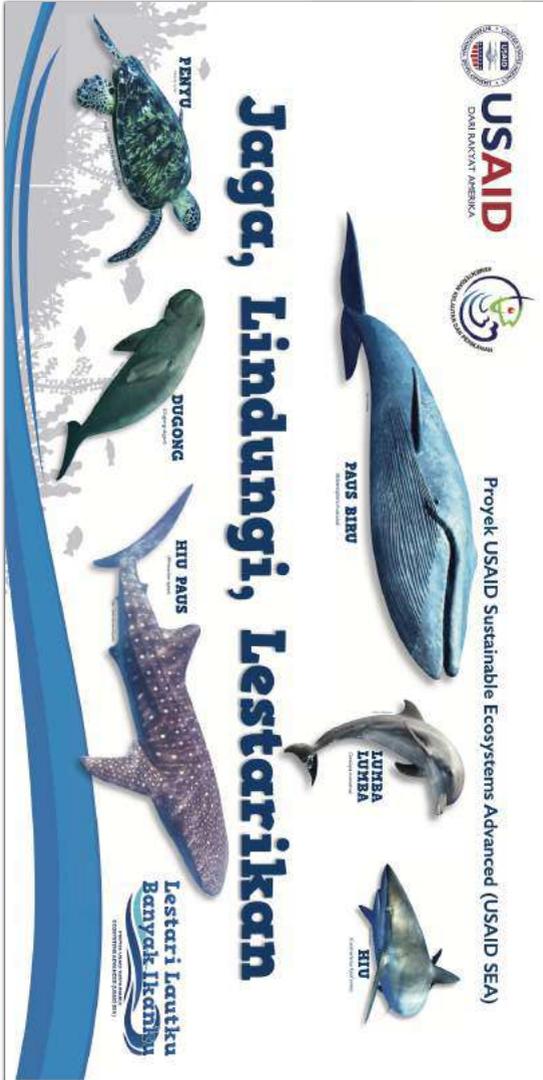
# 7 Nomor Telpon Penting Mitra Pokmaswas



No	Mitra Pokmaswas	Nomor Telpon
 01	Nomor Hotline Laporan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan di KKP	<b>085 88888 4171</b>
 02	Nomor Telpon PSDKP Ambon	<b>0911 351783</b>
 03	Nomor Telpon Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku	<b>0911 352216</b>
 04	DKP Maluku Bidang Pengawasan	<b>0813 4313 0302</b>
 05	Pengawas Perikanan PSDKP di Maluku Utara/ Morotai	<b>0821 3444 2121</b>
 06	Polsus Maluku Utara	<b>0813 5593 8947</b>
 07	DKP Papua Barat Bidang Pengawasan	<b>0813 5588 0040</b>

# Lampiran I

Species Laut Terancam Punah dan Dilindungi





Proyek USAID Sustainable Ecosystems Advanced (USAID SEA)

Tahukah sahabat laut bahwa:

- Ada 221 spesies hiu di wilayah perairan Indonesia.
- Hiu tidak menyerang manusia jika tidak diganggu.
- Hiu menjaga ekosistem laut tetap sehat dengan memakan ikan-ikan tua dan sakit.
- Reproduksi hiu lambat dan membutuhkan proses tumbuh menjadi dewasa selama 15 tahun.
- Perdagangan dan konsumsi sirip hiu menjadi ancaman terbesar bagi hiu.
- Hiu terancam punah.

**Fakta**



**Sirip Hiu  
Bukan Untuk  
Dikonsumsi!**

- Permen KP No. 18/2013 yang memuat tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus.
- Permen KP No. 12/2012 dan Permen KP No. 57/2014, mengenai Tindakan Konservasi terhadap Ikan Hasil Tangkapan Sampingan (bycatch).
- Ratifikasi CITES tentang perdagangan internasional untuk spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah sejak 1975.
- Kepmen KP No. 79/2018 Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Hiu dan Pari 2016-2020.





**USAID**  
DARI RAKYAT AMERIKA



Proyek USAID Sustainable Ecosystems Advanced (USAID SEA)

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR  
18/KEPMEN-KP/2013 TENTANG PENETAPAN STATUS  
PERLINDUNGAN PENUH IKAN HIU PAUS (*Rhincodon typus*)

## HIU PAUS

(*Rhincodon typus*)



**TERANCAH  
PUNAH!**

Halo sahabat laut,  
Ada info penting nih, ternyata hiu paus bukan mamalia laut, dan mereka tidak menyakiti manusia.

Hiu paus besarnya bisa mencapai **18-20 meter** sehingga hiu paus disebut sebagai ikan terbesar di dunia.

Hiu paus dan kawanannya juga berperan penting sebagai penjaga keseimbangan ekosistem laut.

Hiu paus menjadi daya tarik dan ikon wisata, seperti di Batubarani – Gorontalo, Kep. Derawan - Berau, Teluk Cendrawasih – Papua Barat, dan Pantai Bentar - Probolinggo.



— 18 - 20 m —

Perbandingan ukuran  
hiu paus dan bus



USAID  
DARI RAKYAT AMERIKA



Proyek USAID Sustainable Ecosystems Advanced (USAID SEA)

## AYO LINDUNGI SI LUMBA-LUMBA DAN HABITATNYA!

Halo sahabat laut,  
Tahukah sahabat jika kita melindungi  
lumba-lumba (*Tursiops truncatus*)  
dari kepunahan, sebenarnya mereka  
juga ikut melindungi kita?

Mamalia laut ini merupakan  
jenis pemangsa yang  
turut berperan mengontrol  
populasi ikan, dan cumi-cumi  
untuk menjaga keseimbangan rantai  
makanan di laut.

Lumba-lumba tidak bisa berenang mundur, jadi  
tolong lepaskan kembali ke laut ya, jika secara tidak  
sengaja mereka tertangkap jaring ikan para nelayan.

Dengan begitu lumba-lumba akan terus berenang bebas di  
laut lepas dan bisa menjadi daya tarik wisata yang berharga  
bagi orang banyak.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan lumba-lumba  
sebagai salah satu satwa laut yang dilindungi secara penuh  
sesuai dengan UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber  
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, PP No.7 Tahun 1999  
tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Permen  
LHK Nomor P106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018  
memuat Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi,  
Kepmen KP No. 79/2018 tentang Rencana Aksi Nasional  
Konservasi Mamalia Laut.



**UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 40**  
Dilarang menangkap, melukai,  
membunuh, menyimpan,  
mengangkut, memperniagakan satwa  
yang dilindungi dalam keadaan hidup  
atau mati. Diancam pidana penjara  
5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp  
100.000.000 (seratus juta rupiah) bagi  
yang melanggar.

Catatan: memperniagakan artinya  
memperjualbelikan

(*Tursiops truncatus*)



Proyek USAID Sustainable Ecosystems Advanced (USAID SEA)

## DUGONG DUGON "PEREMPUAN LAUT" Terancam Punah

Dugong (*Dugong dugon*) atau "Duyung" merupakan satu dari 35 jenis mamalia laut di Indonesia yang termasuk dalam ordo Sirenia. Satu dari 20 spesies prioritas hewan laut yang dilindungi secara penuh oleh Pemerintah Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawatan Jenis Tumbuhan & Satwa, Kepmen KP No. 79/2018 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Mamalia Laut.



Lamun (*Seagrass*) merupakan tumbuhan berbunga (*Angiospermae*) yang tumbuh dengan baik dalam lingkungan air dangkal, dan banyak yang mempunyai akar rimpang. Bunga dan buah keayuan tumbuhan bersembunyi di dalam.

### Manfaat Ekosistem Lamun

1. **Fungsi proteksi** (melindungi pesisir pantai dari potensi abrasi).
2. **Penting** (menyaring polutan laut dan menjaga kualitas air laut).
3. **Rumah ikan** (tempat ikan kecil berkembang dan mencari makan bagi banyak biota laut).
4. **Menyimpan karbon** (menyerap CO<sub>2</sub> hingga 2 kali lebih banyak (hingga 83.000 ton/km<sup>2</sup>) dari kemampuan hutan di darat).
5. **Terancam** (selain memiliki manfaat, ekosistem lamun juga terancam, dari 1.507 km<sup>2</sup> padang lamun di Indonesia, hanya 5% yang tergolong sehat, 80% kurang sehat, dan 15% tidak sehat) – LPI, 2017.

### Tahukah kamu, dugong itu:

1. **Berukuran besar** (panjang tubuh bisa mencapai 3 meter dengan berat hingga 450 kg. Bentuk ekornya mirip lumba-lumba).
2. **Herbivora** (adalah satu-satunya mamalia laut pemakan lamun dan turut berperan menyeimbangkan ekosistem lamun di laut).
3. **Penyelam sejati** (yang bisa berenang dan menahan napas hingga 12 menit).
4. **Terancam** (ancaman terbesar bagi dugong adalah polusi dan pembangunan pesisir; terjerat (*by catch*) oleh jaring ikan nelayan, lalu lintas kapal, dan perburuan oleh manusia untuk diambil daging dan minyaknya).
5. **Umur panjang** (bisa mencapai umur 70 tahun).
6. **Sensitif** (bisa stres jika mendengar suara yang keras atau berisik, seperti suara derum kapal).
7. **Suka perairan hangat** (habitat dugong bisa ditemukan di sepanjang perairan Samudra Hindia dan Pasifik. Di Maluku bisa ditemui di P. Aru, P. Lease, P. Seram dan Halmahera. Di Papua ditemui di P. Biak, Sorong dan Fakfak).



Dugong dugon



Proyek USAID Sustainable Ecosystems Advanced (USAID SEA)

## MARI JAGA SAMA-SAMA

## TETERUGA JANG SAMPE DIA PUNAH!

**Teteruga** adalah nama lokal penyu (*Chelonia mydas*) bagi masyarakat di Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat.



*Chelonia mydas*

Foto: USAID SEA/Mertan Wafy

### Fakta penyu

- Populasi penyu terancam punah akibat perubahan cuaca, rusaknya habitat penyu bertelur, konsumsi penyu serta telurnya.
- Penyu menjaga keseimbangan ekosistem, membantu pertumbuhan terumbu karang dengan memangsa sponge, serta menjaga produktivitas habitat lamun.
- Penyu merupakan hewan penting dalam jaringan rantai makanan di laut.
- Penyu membutuhkan waktu reproduksi yang lama dan jumlah tukik yang mencapai umur dewasa sedikit. Dari 1000 tukik (anak penyu) yang menetas, hanya beberapa ekor yang bisa bertahan hidup hingga dewasa karena beberapa faktor alam, termasuk akibat serangan predator.
- Konsumsi daging dan telur penyu tidak baik bagi kesehatan manusia.

### Penyu dilindungi secara penuh oleh Pemerintah melalui:

- UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan No. S26/MEN-KP/VIII/2015 tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Telur, Bagian Tubuh dan/atau Produk Turunannya.

### Kandungan berbahaya dari daging dan telur penyu:

- Polutan Organik Persisten (POP) dan logam berat yang memicu penyakit seperti kanker, liver, kerusakan sistem saraf.
- *Polychlorinated biphenyl (PCB)* penyu 300 kali di atas batas aman harian yang ditetapkan WHO.
- Kadar kolesterol 1 telur penyu sangat tinggi setara 20 telur ayam.



Proyek USAID Sustainable Ecosystems Advanced (USAID SEA)

## RAKSASA BERHATI LEMBUT TERANCAM PUNAH KARENA PLASTIK

### Fakta

- Paus mamalia laut yang bernapas dengan paru-paru dan melahirkan.
- Paus bermigrasi, Indonesia merupakan salah satu rute migrasinya.
- Spesies paus dapat diidentifikasi dari bentuk sirip punggungnya yang unik.
- Paus memakan plankton, ikan kecil dan udang-udangan.
- Kotoran paus adalah sumber nutrisi fitoplankton di laut. **Fitoplankton ini sangat penting karena mereka yang menghasilkan oksigen.**
- Keberadaan paus penting dalam menjaga keseimbangan rantai makanan di laut.



“**MARI KITORANG  
JAGA PAUS,  
TANPA BUANG SAMPAH  
DI LAUT!**”



### Ancaman

Tertangkap jaring nelayan tanpa sengaja, lalu lintas kapal yang padat di laut dapat melukai paus yang sering muncul di permukaan laut, terdampar di pantai, sampah plastik di laut dan limbah beracun lainnya, kebocoran minyak, perubahan iklim.

### Dilindungi sesuai:

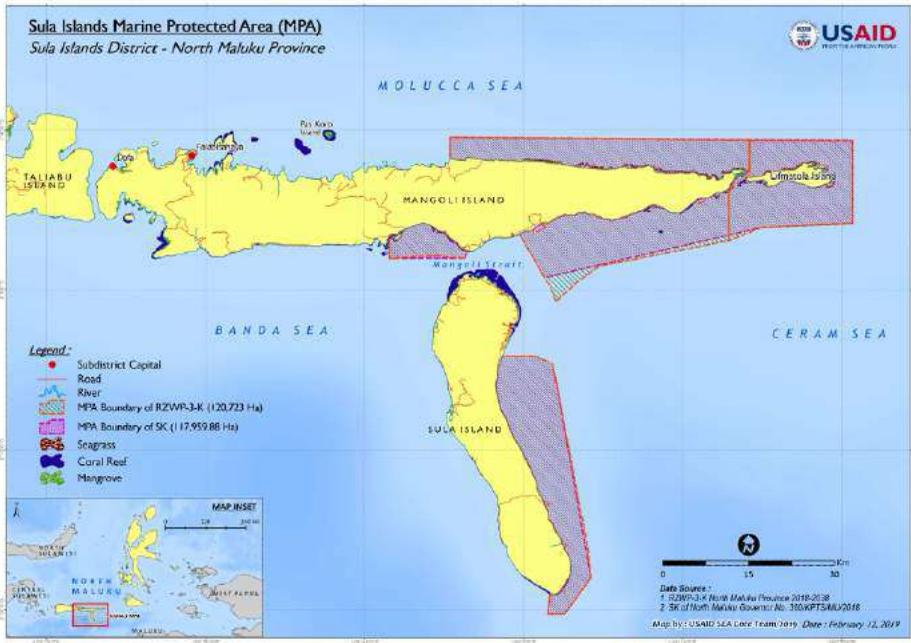
- UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- PP No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- Permen LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 yang memuat tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.
- Kepmen KP No. 79/2018 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Mamalia Laut.



# 03 Lampiran 3

Keulauan Sula

## KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KEPULAUAN SULA



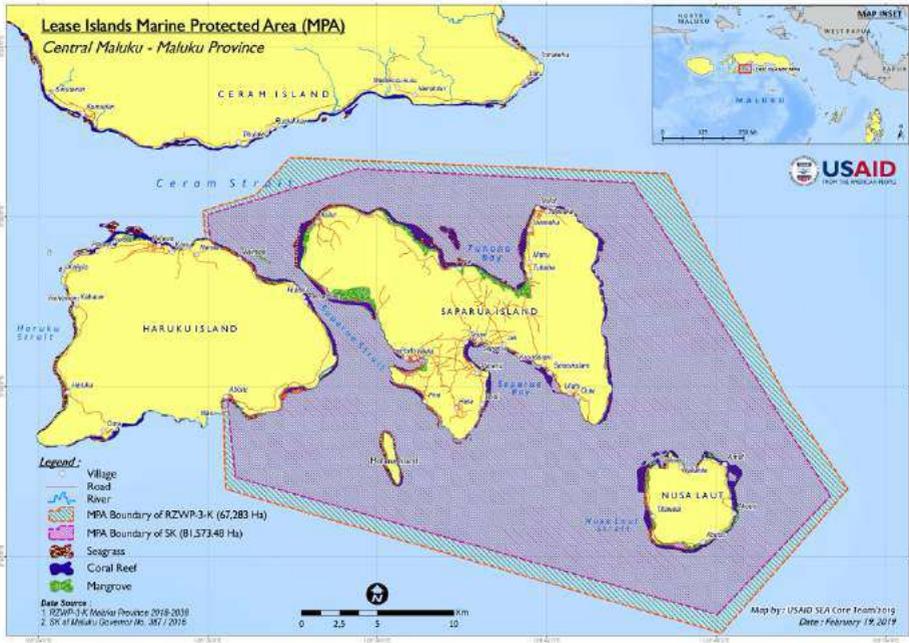
# Lampiran 4

Kepulauan Lease

# 04



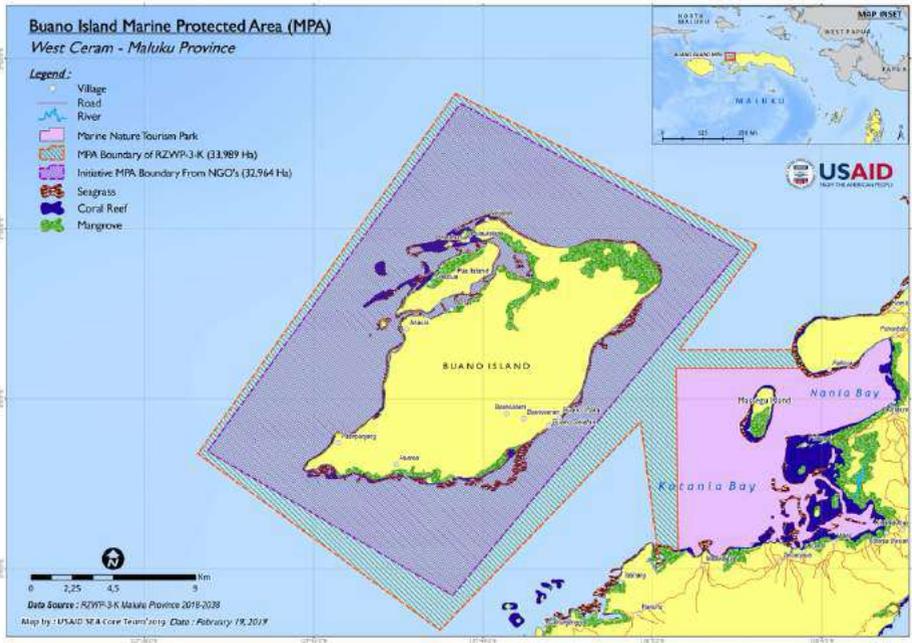
## KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KEPULAUAN LEASE



# 05 Lampiran 5

Pulau Buano

## KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULAU BUANO

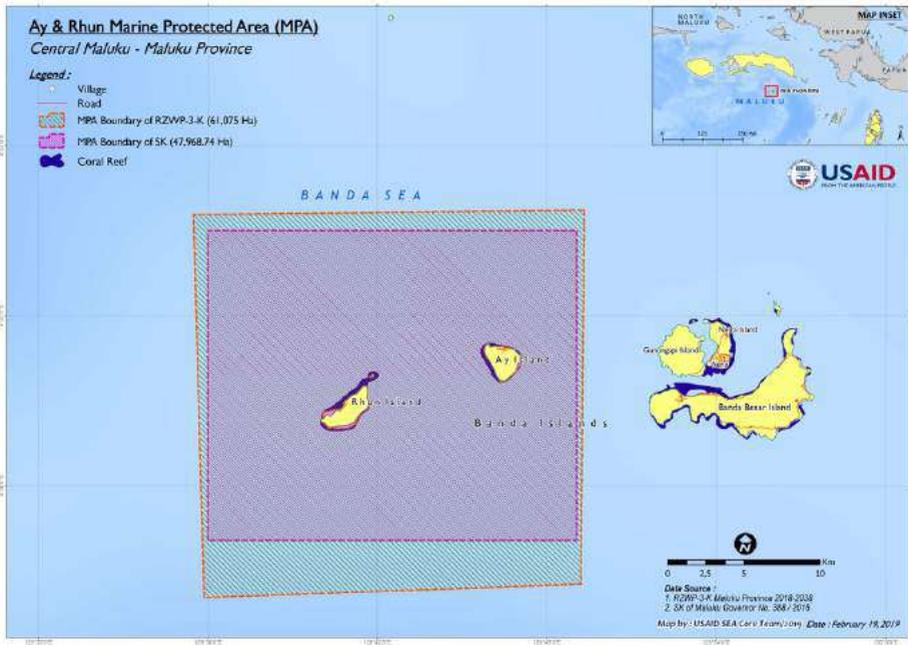


# Lampiran 6

Pulau Ay dan Pulau Rhun Kepulauan Banda



## KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULAU AY DAN RHUN KEPULAUAN BANDA





Publikasi ini diproduksi atas dukungan dari United States Agency for International Development (USAID) dan kolaborasi dengan Pemerintah Indonesia. Seluruh isi publikasi ini merupakan tanggung jawab USAID SEA dan tidak mencerminkan pandangan dari USAID maupun Pemerintah Amerika Serikat.

## Proyek **USAID Sustainable Ecosystems Advanced (USAID SEA)**



**USAID**  
DARI RAKYAT AMERIKA

